

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2018 di Kabupaten Wonosobo diampu oleh Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo selaku *leading sector*, dan didukung oleh Kecamatan Wonosobo, Kelurahan Pagerkukuh, Kelurahan Kalianget, Kecamatan Kertek, Kecamatan Selomerto, dan Kecamatan Leksono.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 telah mengalokasikan dana sebesar Rp22.881.420.987,00 atau 1,11 % dari total alokasi APBD Tahun 2018 yang berjumlah Rp2.072.393.505.735,00. Alokasi tersebut di atas dapat terealisasi sebesar Rp20.287.055.498,00 atau 88,66%. Adapun program dan alokasi anggaran Urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.C.5.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Realisasi Anggaran
A	Belanja Langsung	15.020.766.100	13.627.770.354	90,73
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5.615.380.000	4.741.889.220	84,44
2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.600.000.000	2.496.852.221	96,03
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	225.000.000	223.427.750	99,93
4	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	50.000.000	49.865.000	99,73
5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	100.000.000	97.178.100	97,18
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.620.617.000	1.241.965.625	76,64
7	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	100.000.000	99.286.250	99,29
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.111.641.400	3.099.132.336	99,60
9	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.598.127.700	1.598.127.700	98,75
B	Belanja Tidak langsung	7.860.654.887	6.659.285.144	84,72
	Belanja Pegawai	7.860.654.887	6.659.285.144	84,72
	Jumlah total	22.881.420.987	20.287.055.498	88,66

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2018, diolah.

Secara umum, capaian realisasi anggaran urusan lingkungan hidup sudah bagus, rata-rata pada kisaran di atas 80an persen. Hanya saja ada 1 program yang terdapat capaian realisasi anggaran yang rendah yaitu hanya 76%. Rendahnya capaian dikarenakan ada kegiatan yang gagal lelang sehingga tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan tersebut yaitu penyediaan peralatan laboratorium untuk uji kualitas air dan pendukungnya.

b. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2018, dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Sanpah masih menjadi masalah yang cukup besar di Kabupaten Wonosobo. Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitasnya berakibat pada bertambahnya volume timbulan sampah. Penanganan persampahan oleh pemerintah kabupaten diwujudkan pada program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan yang dituangkan dalam beberapa kegiatan yaitu penyediaan prasaranan dan sarana pengelolaan persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan prasaranan dan sarana persampahan, Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, Pengolahan Sampah (DAK), Pembangunan TPST Tingkat Kecamatan, Pengadaan Alat Pengumpul dan Pengangkut Sampah, Penyusunan Rencana Pengadaan Tanah Untuk TPA Wonorejo, Penyusunan DED Tempat Pengelolaan Sampah (TPA) Wonorejo, Pengolahan Sampah *Pirolisis System*, Pengadaan Instalasi dan Lampu Penerangan Jalan Umum TPA Wonorejo, Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pembangunan TPS, Pengadaan Tanah untuk TPA di Wonorejo. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kelurahan Pagerkukuh, Kel. Kalianget, Kecamatan Wonosobo dan Kecamatan Leksono. Penyediaan prasaranan dan sarana pengelola persampahan di Kecamatan Kertek dan Kecamatan Selomerto.

Adanya kegiatan dalam program ini secara signifikan memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja penanganan persampahan dari angka 34% menjadi 43%. Angka capaian memang masih dibawah standar layanan persampahan, namun demikian sudah ada upaya kenaikan kinerja. Hal ini dipengaruhi oleh upaya penanganan sampah di sumbernya seperti pembangunan TPST kecamatan/kelurahan di Kecamatan Wadaslintang, Sapuran, Mojotengah da Garung. meskipun masih sangat kurang, pembangunan gedung bank sampah di Kecamatan Kertek dan Selomerto Peningkatan kinerja persampahan masih menyisakan persoalan lain di TPA. Hal ini karena beban TPA Wonorejo menjadi sangat bertambah. Banyak sampah yang masuk ke TPA. Seharusnya, hanya sampah yang tidak bisa diolah yang baru bisa masuk ke TPA. Banyak angkutan dari desa yang membuang sampah langsung di TPA.

Sementara itu, kondisi di daya tampung TPA Wonorejo yang semakin berkurang, tidak seimbang dengan semakin besarnya volume sampah yang masuk TPA sehingga perlu adanya perluasan lahan untuk zona aktif TPA yang sudah hampir *overload*. Pada tahun 2018 ditangani dengan pengadaan tanah. Namun demikian masih kurang beberapa hektar untuk mencapai standar 5 hektar luasan TPA sistem *sanitary landfill*. Namun demikian, terkait dengan kebersihan, melalui program ini juga turut mendukung tercapainya penghargaan Desa Kalimendong Kecamatan Leksono sebagai Pemenang Lomba Lingkungan Bersih Sehat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan pada program ini diupayakan untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kegiatan/usaha masyarakat berpotensi berdampak pada pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Beberapa kegiatan dalam program ini dilatarbelakangi fenomena masih banyak kegiatan/usaha yang belum melaksanakan pengelolaan lingkungan secara optimal. Kegiatan yang dilakukan antara lain, Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura, Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, Pengelolaan B3 dan Limbah B3, Pengkajian dampak lingkungan, Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih, Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup, Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Pembangunan Saluran Pembuangan Air Lindi, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil (IPAL-USK) (DAK), Penyediaan Peralatan Laboratorium Untuk Uji Kualitas Air dan Pendukungnya (DAK), Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pegiat Lingkungan Kabupaten Wonosobo. Pada kegiatan pemantauan kualitas lingkungan diperoleh output dokum IKPLHD. IKPLH (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) disusun sebagai sarana penyampaian informasi yang memuat kondisi aktual lingkungan (*state*), tekanan terhadap lingkungan (*pressure*) dan upaya - upaya yang dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup (*response*). Dengan tersusunnya dokumen IKPLH diharapkan masyarakat akan memperoleh haknya terhadap akses informasi lingkungan hidup yang akan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada program ini, dukungan di wilayah Kecamatan Wonosobo yaitu untuk pelaksanaan kegiatan Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura. Kecamatan Wonosobo yang merupakan salah satu titik pantau penilaian adipura.

3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Pada program ini dilakukan kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan. Penyediaan data dan informasi yang cepat dan aktual merupakan hal penting yang harus disiapkan oleh Pemerintah. Hal ini mendasari pada kemampuan pemerintahan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi

multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Inventarisasi data kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan di Kabupaten Wonosobo sangat diperlukan sehingga dapat tersusun dokumen usaha yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan. Kegiatan usaha tersebut nantinya akan menjadi objek pemantauan kualitas lingkungan hidup.

4) Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Kegiatan yang dilakukan dalam program ini pada tahun 2018, difokuskan pada pengendalian polusi udara, yaitu dengan pengujian emisi kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo akan dilihat pengaruhnya terhadap sumbangan polusi udara. Namun demikian, polusi udara di Kabupaten Wonosobo masih dalam ambang batas aman.

5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air, Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, Pengendalian Kerusakan Hutan Dan Lahan. Melalui program ini telah diperoleh hasil pendataan mata air di Kecamatan Sapuran, Kepil, Kalikajar dan Mojotengah. Dari direktori mata air dapat diketahui secara pasti kondisi mata air yang ada di Kabupaten Wonosobo, meskipun masih terbatas di beberapa kecamatan. Pada program ini juga telah dicapai penghargaan piala Program Iklim KLHK Tingkat Nasional di Desa Blederan Kecamatan Mojotengah. Sementara itu, Desa Candirejo Kecamatan Mojotengah, Kampung Prajurit Kelurahan Wonosobo Timur Kecamatan Wonosobo, Desa Wulungsari Kecamatan Selomerto, dan Kelurahan Wonoroto Kecamatan Watumalang menerima Sertifikat Penghargaan Kampung Iklim Kategori Kampung Iklim Utama Tahun 2018.

6) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tutupan vegetasi Kabupaten Wonosobo masih tergolong dalam kondisi baik terkait dengan pengaruhnya terhadap rendahnya tingkat polusi udara. Tutupan vegetasi dalam hal ini difokuskan pada keberadaan ruang terbuka hijau menjadi salah satu tolok ukur indeks kualitas lingkungan hidup. Keberadaan ruang terbuka hijau merupakan komponen ruang wilayah yang tingkat ketersediannya baik secara kualitas dan kuantitas selalu diperhitungkan. Ruang hijau dengan tanaman atau vegetasi hijau baik berupa pohon, semak, maupun rumput di ruang terbuka mempunyai nilai ekologi untuk keseimbangan alam, yaitu dapat mengurangi dampak negatif akibat kegiatan manusia seperti mengabsorpsi polutan udara, menurunkan suhu, meresapkan air hujan, menangkai suara, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH dilakukan program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). Kegiatan dalam program tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2018 diantaranya penyusunan program pengembangan RTH, pemeliharaan RTH, pembangunan taman, revitalisasi alun-alun dan lanjutan pembangunan taman Mandala Wisata.

7) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya alam

Pada program ini dilakukan kegiatan rehabilitasi lahan kritis. Rehabilitasi lahan kritis tahun 2018 dilakukan di Kecamatan Kertek (Candimulyo), Kepil, Kaliwiro (Selomanik), Kalibawang (Depok), dan Wadaslintang (Kaligowong dan Ngalian). Penanganan rehabilitasi ini melalui pemberian bibit tanaman seperti jenitri, pujung, beringin, arena, albasia dan pohon buah-buahan seperti durian, manggis, alpukat

8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi kelembagaan Perangkat Daerah Dinas LH sebagai pengampu urusan lingkungan hidup. Tujuan program ini adalah menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS, Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan, penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan.

9) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sarana dan prasarana aparatur yang memadai diperlukan untuk peningkatan kinerja aparatur yang secara tidak langsung nantinya akan memberikan dampak manfaat pada peningkatan kinerja urusan lingkungan hidup. Program ini mencakup kegiatan pembangunan gedung kantor, pengadaan mebeleur, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kendaraan dinas/operasional, mebeleur, peralatan kantor, alat berat, perbengkelan dan prasarana umum. Dalam rangka peningkatan kinerja, Dinas LH juga memerlukan tambahan garasi armada pengangkutan sampah serta DED pembangunan perluasan gedung laboratorium LH.

c. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada beberapa indikator lingkungan hidup yang tersaji pada tabel berikut :

Capaian pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup juga didasarkan pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah berdasar Indikator Kinerja RPJMD. Adapun capaiannya dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.C.5.2

Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018 berdasarkan Indikator RKPD 2018

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD)
	Program			Target 2018	Capaian 2018	% Realisasi Capaian 2018	Status Capaian 2018	2021
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		72,09	65	69,73	107,28	0	>65
2	Persentase luas RTH perkotaan per luas wilayah perkotaan	%	41,47	39,29	42,3	107,66	0	40
3	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan	%	75	80	80,51	100,64	0	100
4	Persentase panjang sempadan sungai utama berupa ruang terbuka hijau	%	97	88	87,99	99,99	◇	88
5	Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	77,7	84	79,17	94,25	◇	100
6	Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	86,7	88	84,21	95,69	◇	100
7	Persentase Kualitas Sumber Mata Air Kelas A	%	83	88	86,7	98,52	◇	100
8	Indeks Kualitas Udara		97,57	74	87,41	118,12	0	80
9	Indeks Kualitas Air Sungai		50	65	52,29	80,45	◇	70
10	Indeks Tutupan Vegetasi		48,59	91,28	69,55	76,19	● ● ●	91,28
11	Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi	%	59,65	45	63,16	140,36	0	0,9

IV.C.5. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD)
	Program			Target 2018	Capaian 2018	% Realisasi Capaian 2018	Status Capaian 2018	2021
12	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100,00	0	100
13	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	%	100	100	100	100,00	0	100
14	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	2,86	29	7,93	27,34	△ △ △ △	50
15	Persentase KRP wajib KLHS yang dilengkapi dokumen KLHS	%	11,76	45	16,67	37,04	△ △ △ △	80
16	Persentase ibukota kecamatan yang terpasang informasi status kualitas udara dan air	%	0	22	20	90,91	◇	67
17	Persentase peningkatan kunjungan portal lingkungan Kabupaten Wonosobo	%	10	30	47,37	157,90	0	70
18	Rasio motivator lingkungan terhadap 10000 penduduk		3,18	5,3	5,26	99,25	◇	75
19	Persentase kendaraan roda empat yang lolos uji emisi	%	55,42	25	45,69	182,76	0	60
20	Persentase usaha yang memiliki IPAL terhadap industri wajib IPAL	%	50	41	50	121,95	0	50
21	Persentase luas lahan kritis pada kawasan budidaya dan lindung diluar hutan	%	28	32,46	20,93	64,48	● ● ●	27831
22	Persentase sumber mata air yang rusak	%	2,86	10	3,27	167,30	0	0,1
23	Persentase tutupan vegetasi	%	51,23	74,83	51,23	68,46	● ● ●	74,83
24	Persentase penanganan sampah	%	34,58	33,47	43,49	129,94	0	60

IV.C.5. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD)
	Program			Target 2018	Capaian 2018	% Realisasi Capaian 2018	Status Capaian 2018	2021
25	Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk		0,68	0,6	0,48	80,00	◇	0,8
26	Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R Skala Kecamatan	unit	0	3	1	33,33	△ △ △ △	7
27	Persentase Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Skala Desa/Kelurahan	%	6,04	13,1	6,79	51,83	● ● ●	25
28	Persentase RW yang memiliki Bank Sampah	%	6,85	55,7	10,46	18,78	△ △ △ △	100
29	Persentase pengurangan sampah perkotaan	%	2,87	10	11,14	111,40	⓪	20
30	Persentase pengoperasian TPA	%	30	35	30	85,71	◇	80

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2018 (diolah)

Keterangan Status Capaian:

⓪	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
◇	Akan tercapai	Realisasi capaian $>80\%$ - $99,99\%$
● ● ●	Perlu Perhatian	Realisasi capaian $>40\%$ dan $<80\%$
△ △ △ △	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq 40\%$

Berdasarkan tabel IV. C.5.2 diatas, pada urusan lingkungan hidup masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan yaitu misalnya terkait indikator penanganan persampahan beserta indikator turunannya seperti misalnya persentase RW yang memiliki bank sampah, indikator kualitas air sungai, rasio motivator lingkungan hidup per satuan penduduk. Capaian kinerja persampahan yang masih dalam angka 43% harus ditingkatkan lagi. Upaya peningkatan kinerja perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, masyarakat dan swasta. Dukungan dari pemerintah desa yang menganggarkan kendaraan angkut sampah harusnya diikuti pula dengan penyediaan TPS terpadu dengan bantuan binaan dari pemerintah daerah. Hal ini karena selama tahun 2018 ada tren kenaikan volume sampah yang cukup besar dibanding tahun sebelumnya yang masuk di TPA Wonorejo yang berasal dari desa. Sementara itu, desain TPA hanya melayani wilayah RIK perkotaan saja. Jikalau ada penambahan dari luar wilayah layanan, seharusnya hanyalah sampah sisa yang sudah tidak dapat diolah.

IV.C.5. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Upaya peningkatan kinerja ini tentunya tetap membutuhkan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Untuk jumlah TPS skala kecamatan yang sudah dapat beroperasi saat ini baru ada 1 unit yang berada di Desa Sedayu Kecamatan Sapuran. TPST ini mampu melayani persampahan diluar desanya. Capaian kinerja persampahan yang masih rendah lainnya yaitu persentase RW yang memiliki bank sampah baru mencapai 10,46%, dengan realisasi capaian terhadap target 2018 hanya sebesar 18,78%. Jumlah RW yang memiliki bank sampah masih rendah disebabkan kurangnya kesadaran dan belum memahami pentingnya pengelolaan sampah melalui bank sampah. Guna meningkatkan jumlah RW yang memiliki bank sampah diperlukan sosialisasi pentingnya pengelolaan sampah melalui bank sampah dan pembinaan pengelolaan bank sampah yang sudah terbentuk. Dengan tumbuhnya bank sampah di tingkat RW, maka diharapkan persentase pengurangan sampah perkotaan akan meningkat karena cakupan pengelolaan sampah 3R meningkat. Persentase pengoperasian TPA perlu ditingkatkan melalui pengelolaan air lindi yang memenuhi baku mutu air limbah dan pengelolaan gas yang ditimbulkan TPA. Untuk capaian lainnya yang masih perlu kerja keras yaitu seperti persentase KRP wajib KLHS yang dilengkapi KLHS. Capaian indikator ini sangat tergantung dengan perangkat daerah yang menyusun kebijakan, rencana, program. Sebagai contoh, KRP yang telah ada yaitu RPJMD, RTRW dan revisi RTRW yang telah disusun KLHS-nya. Sementara itu jenis KRP lainnya untuk RDTR-rencana detail tata ruang belum disusun KLHS-nya karena pada bidang penataan ruang sedang fokus pada upaya legalisasi revisi RTRW. Jadi, KLHS RDTR belum disusun.

d. Permasalahan dan Solusi

Tabel IV.C.5.3
Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Lingkungan Hidup

No.	Permasalahan	Solusi
1	Penanganan persampahan belum optimal	▪ Mengurangi timbulan sampah dari sumbernya ▪ Mendorong dan mengadvokasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan TPST ▪ Mendorong penyelenggaraan “zero waste event” terutama di tempat umum ▪ penambahan luas TPA Wonorejo hingga mencapai 5 hektar ▪ optimalisasi pengoperasian TPA Wonorejo ▪ identifikasi calon lokasi TPA di 4 zona pewilayahan ▪ percepatan peningkatan pembangunan TPST di setiap kecamatan ▪ edukasi dan kampanye secara masif tentang pengelolaan persampahan ▪ peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan ▪ penegakan perda pengelolaan persampahan ▪ meningkatkan peran serta masyarakat dan kemitraan

IV.C.5. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup**

No.	Permasalahan	Solusi
		dalam pengelolaan persampahan
2	Meningkatnya limpasan air permukaan	▪ pembangunan sumur resapan di zona resapan air tinggi. ▪ Intensifikasi pemanenan air hujan ▪ koordinasi dengan PD yang menangani drainase terkait pembangunan <i>ecodrain</i> dan revitalisasi saluran drainase ▪ Pengaturan ketat persentase kawasan terbangun di kawasan resapan ▪ Advokasi pengolahan lahan budidaya yang merusak lingkungan di daerah hulu
3	Penyediaan RTH publik perkotaan masih dibawah standar pelayanan minimal	▪ Mempercepat pengembangan RTH di lahan milik Pemerintah ▪ meningkatkan kualitas RTH
4	Masih adanya kegiatan/usaha yang belum melaksanakan pengelolaan lingkungan secara optimal	▪ Peningkatan pengawasan secara rutin dan periodik terhadap semua jenis usaha dan industri yang berpotensi mencemari lingkungan ▪ Peningkatan monitoring dan evaluasi secara intensif dan masif terkait implementasi dokumen pengelolaan lingkungan hidup (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) ▪ melakukan pembinaan dan sosialisasi upaya pengelolaan lingkungan
5	Masih adanya kerusakan lahan dan/atau kekritisn lahan karena kegiatan budidaya	▪ Edukasi petani praktik pertanian ramah lingkungan ▪ Demplot pertanian ramah lingkungan ▪ Percepatan upaya lahan kritis dan perbaikan kerusakan lahan di luar kawasan hutan ▪ Pengusulan Geopark Dieng ▪ koordinasi pemprov untuk penertiban pertambangan ▪ edukasi pertambangan resmi dan ramah lingkungan ▪ konservasi bekas galian tambang
6	Tingginya pencemaran air di DAS Serayu dan Bogowonto	▪ mengurangi penggunaan pupuk CM dan bahan kimia pada bidang pertanian ▪ stimulan pembangunansistem pengolahan air limbah domestik (SPAL-D), dan IPAL usaha kecil
7	Terbatasnya SDM handal, pendanaan, sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan lingkungan hidup	▪ peningkatan afirmasi pendanaan untuk urusan lingkungan hidup dari berbagai sumber anggaran yang sah. ▪ Peningkatan kapasitas SDM dalam urusan lingkungan hidup ▪ Optimalisasi operasional laboratorium lingkungan hidup
8	Sinergi dalam pengelolaan lingkungan belum optimal	▪ meningkatkan sinergitas antar sektor dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup ▪ mendorong kemitraan multipihak dalam pengelolaan lingkungan